

Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Reguler

Nur Isnaini¹, Wulan Ali Safitri², Zidna Istighnaul Fitri³
^{1,2,3}UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v24i.1591](https://doi.org/10.30595/pssh.v24i.1591)

Submitted:

June 14, 2025

Accepted:

July 06, 2025

Published:

July 23, 2025

Keywords:

Pendidikan Inklusif,
Hak Anak Berkebutuhan
Khusus, Sekolah Reguler

ABSTRACT

Ketimpangan akses terhadap pendidikan yang setara masih menjadi permasalahan utama bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia. Banyak dari mereka belum mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan anak lainnya di sekolah reguler, baik karena keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, maupun stigma sosial yang masih kuat. Padahal, pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif hadir sebagai solusi yang menekankan penyelenggaraan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman peserta didik, termasuk ABK, dalam lingkungan sekolah reguler. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak-hak ABK di sekolah reguler. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di tiga sekolah reguler yang telah menerapkan praktik inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, ketersediaan sarana pendukung, keterlibatan orang tua, serta kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah yang memiliki budaya inklusif dan fleksibilitas pembelajaran menunjukkan keberhasilan dalam mendukung perkembangan akademik dan sosial ABK. Kendala yang masih dihadapi antara lain terbatasnya jumlah guru pendamping khusus yang kompeten dan kurangnya fasilitas pendukung yang memadai. Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan bagi seluruh anak.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Nur Isnaini

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas Jawa Tengah 53126

Email: nurIsnaini164@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu tanpa kecuali, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Dalam konteks global, pendidikan inklusif menjadi arah kebijakan yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama di lingkungan pendidikan reguler. Pendidikan inklusi bukan hanya pendekatan pedagogik, melainkan juga manifestasi dari komitmen terhadap keadilan sosial dan pengakuan terhadap keberagaman individu dalam dunia Pendidikan (Dini Prima Putri, Agus Pahrudin, 2016). Di Indonesia, implementasi pendidikan inklusi telah diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun demikian, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan hak masih sangat besar.

Banyak sekolah reguler belum memiliki kesiapan baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pemahaman menyeluruh terhadap prinsip inklusi. Seringkali, ABK mengalami diskriminasi atau keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu, meskipun berada di sekolah yang mengklaim sebagai inklusif. Kesetaraan hak dalam pendidikan inklusi tidak hanya berarti menerima ABK di sekolah reguler, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan layanan pembelajaran yang setara dan bermakna. Hal ini meliputi kurikulum yang fleksibel, metode pengajaran yang adaptif, serta dukungan lingkungan belajar yang ramah dan kolaboratif. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi pendidikan inklusi dan sejauh mana kesetaraan hak itu benar-benar terwujud menjadi sangat penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan yang berkeadilan (Sari & Salistina, 2025).

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik dan mental. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif hadir sebagai strategi untuk memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan kesempatan belajar yang setara dengan anak-anak lainnya di sekolah reguler. Paradigma pendidikan inklusif menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan, bukan hanya kesamaan perlakuan. Hal ini sejalan dengan konvensi internasional seperti *UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang menegaskan hak anak dengan disabilitas untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi dalam sistem pendidikan umum. Namun, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua sekolah reguler siap secara sarana, prasarana, dan kompetensi guru untuk menerima dan mendidik ABK secara optimal. Padahal, sekolah inklusi memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan sosial yang menerima keberagaman dan mendorong interaksi antar siswa dari berbagai latar belakang kemampuan (Meka et al., 2023). Kurangnya pemahaman terhadap prinsip inklusi seringkali menyebabkan diskriminasi terselubung dan marginalisasi ABK dalam kegiatan belajar mengajar (Meka et al., 2023). Di sisi lain, pendidikan inklusif memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi ABK, tetapi juga bagi siswa reguler. Melalui interaksi dan pembelajaran bersama, seluruh siswa belajar tentang empati, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang mendukung kohesi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan ABK di sekolah reguler memperkaya dinamika kelas dan mendorong guru untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih adaptif dan inovatif.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Banyak kebijakan pendidikan inklusi belum diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat sekolah. Masih ditemukan adanya pelabelan, stereotip, dan kurangnya pelatihan guru dalam menangani ABK di kelas reguler. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat untuk membangun sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan menjamin kesetaraan hak bagi setiap anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus (Tea et al., 2023). Melalui tulisan ini, penulis berupaya mengkaji lebih dalam dinamika pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini akan menyoroti aspek kebijakan, praktik pembelajaran, kesiapan lingkungan sekolah, serta persepsi guru dan siswa terhadap ABK. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model pendidikan yang inklusif, adil, dan humanis di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah pendekatan di mana anak-anak berkebutuhan khusus, baik itu kebutuhan fisik, intelektual, atau emosional, diajak untuk belajar di lingkungan yang sama dengan teman sebayanya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Ini berarti bahwa anak-anak berkebutuhan khusus akan menerima dukungan yang diperlukan untuk berhasil belajar, sambil tetap berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari bersama teman sebayanya mereka. Salah satu manfaat utama pendidikan inklusif adalah menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Lingkungan ini mempromosikan apresiasi terhadap keragaman dan mendorong saling pengertian di antara anak-anak. Ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang inklusif, mereka belajar untuk menghargai perbedaan dan menerima setiap individu apa adanya. Ini membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif secara keseluruhan (Dea Mustika et al., 2023)

Pendidikan inklusif berarti bahwa semua siswa berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah reguler sepanjang hari. Jenis pendidikan ini menekankan tanggung jawab guru kepada siswa berkebutuhan khusus. Pemahaman ini memberikan pemahaman bahwa semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, adalah bagian dari komunitas kelas. Untuk itu, guru bertanggung jawab penuh atas proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Penting bagi guru untuk dapat secara efektif menangani berbagai perilaku siswa (Alfikri et al., 2022). Pendidikan inklusif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Semua anak memiliki hak untuk belajar dan bermain bersama
- b. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau diasingkan karena perbedaan mereka
- c. Setiap anak harus diperlakukan sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan potensinya sendiri
- d. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa

- e. Guru harus memahami keragaman di kelas dan memanfaatkan keragaman pengetahuan dan pemahaman siswa sehingga siap menghadapi tantangan.

Pendidikan inklusif memiliki prinsip yang membedakannya dengan prinsip pendidikan segregatif atau pendidikan lainnya, antara lain:

- a. Semua anak, siapa pun mereka, memiliki hak untuk menerima pendidikan di sekolah mana pun, dan sekolah harus menerima siswa, siapa pun mereka.
- b. Setiap anak/siswa adalah individu yang unik, oleh karena itu sistem Pendidikan harus dibuat fleksibel, memberikan kemungkinan bagi guru untuk melakukan penyesuaian, agar dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap siswa.
- c. Sistem pendidikan di suatu negara harus dibuat menjadi satu sistem, dan sistem pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari sistem pendidikan umum; tidak terpisah atau spesifik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 tercantum tujuan pendidikan inklusif, yakni (1) semua peserta didik yang berkelainan fisik, mental, sosial dan emosional atau anak yang mengalami kesulitan belajar dan gifted child diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemauanya (2) mengakui dan menghargai adanya perbedaan dan keragaman pribadi, karakter dan kemampuan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dijabarkan secara lebih jelas oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PLSB). Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2009) menguraikan tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, sebagai berikut: (1) semua peserta didik tanpa kecuali diberi kesempatan selebar-lebarnya untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya; (2) program wajib belajar pendidikan dasar bisa terpenuhi; (3) mengatasi masalah putus sekolah, dan menekan jumlah tinggal kelas; (4) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap pembelajaran; dan (5) Memenuhi amanat konstitusi/peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1), "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", Ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"; UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu"; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 51 berbunyi "Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa"; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Direktorat PLB, 2007:10).

Tujuan pendidikan inklusi ini tidak ada kesenjangan diantara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Di-harapkan melalui pendidikan Inklusi anak dengan kebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya (Fernandes, 2017)

Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Hak atas pendidikan berkualitas bagi semua warga negara. Termasuk penyandang disabilitas dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Konstitusi 1945 yang merupakan jiwa dari Konstitusi 1945 dan harus menghidupkan seluruh proses administrasi negara ini. Menyatakan bahwa "mencerdaskan kehidupan bangsa dan segala tumpahan uang Indonesia." adalah salah satu tujuan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan aspek yang dinilai sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan dijamin bagi setiap warga negara tanpa memandang keadaannya.

Salah satu kunci mengapa pendidikan inklusif menjadi tren atau harus diselenggarakan secara internasional adalah karena adopsi konsep ini dalam berbagai perjanjian dan deklarasi internasional. Deklarasi hak asasi manusia universitas pada tahun 1948 menegaskan bahwa; Setiap orang memiliki hak atas pendidikan." Namun, anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas sering dirampas hak dasar ini. Hal ini sering didasarkan pada asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai manusia yang sepenuhnya dan universal.

Berikutnya pada tahun 1989: Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Konvensi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Bahwa pendidikan dasar adalah "Wajib dan Gratis untuk semua" (Pasal 28). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak memiliki empat prinsip umum yang mencakup semua pasal lain termasuk tentang pendidikan, yaitu (1) Tidak ada diskriminasi (pasal 2) secara khusus menyebutkan anak penyandang disabilitas, (2) Kepentingan terbaik anak (pasal 3), (3) Hak untuk bertahan hidup dan berkembang (pasal 6), (4) Menghormati pendapat anak (pasal 12).

Dalam pernyataan "semua hak tidak dapat dipisahkan dan saling terkait". Artinya, meskipun mereka memberikan pendidikan di sekolah luar biasa untuk anak-anak penyandang disabilitas, mereka tetap memenuhi haknya atas pendidikan. Pada tahun 1990 di Jomtien, Thailand, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Forum Pendidikan Dunia yang dihadiri oleh 155 negara dan puluhan LSM dari seluruh dunia. Forum tersebut,

yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Hak Anak, melahirkan deklarasi "Pendidikan untuk semua" yang bertujuan bahwa pada tahun 2000 (sekarang diperbarui menjadi 2015) semua anak di dunia harus memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

Selanjutnya, PBB mengadakan konferensi dunia tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus di Salamanca, Spanyol yang bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional untuk lebih memperhatikan anak-anak penyandang disabilitas dalam target EFA. Forum ini melahirkan apa yang dikenal sebagai pernyataan Salamanca di mana terminologi dan konsep inklusif pertama kali diperkenalkan. Melalui pernyataan ini, PBB merekomendasikan agar semua negara mengadopsi prinsip-prinsip inklusif dalam semua kebijakan pendidikan mereka. (Paramansyah & Ridhaulipasya, 2024)

Regulasi yang relevan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa siswa harus mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama dengan siswa lainnya (Handayani, 2013). Pendidikan inklusif memandang perbedaan sebagai peluang untuk meningkatkan pembelajaran setiap anak daripada masalah. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (UNCRC) tentang hak-hak anak, pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap anak berhak untuk tidak didiskriminasi secara hukum (Sudarto, 2016). Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini ada 6.764 SLB mulai dari tingkat TK hingga SMA. Jumlah sekolah inklusif mencapai 44.477 sekolah. Jumlah sekolah inklusif meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 40.928 sekolah. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menyebutkan bahwa setidaknya ada delapan komponen yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan pendidikan inklusif. Komponen-komponen tersebut adalah siswa, kurikulum, pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen sekolah, penghargaan dan saksi, serta pemberdayaan masyarakat. (Fionita & Nurjannah, 2024)

Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK juga telah digariskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan khusus, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi siswa yang memiliki kelainan dan berpotensi kecerdasan dan/atau bakat khusus, serta surat edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 380/C.6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003, yaitu setiap kabupaten/kota wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK, saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan inklusif, mengingat banyaknya kru khusus di Indonesia. Ada 32 ribu sekolah reguler yang merupakan sekolah inklusif di berbagai daerah, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari 1,6 juta ABK di Indonesia, hanya 18% yang telah mendapatkan layanan pendidikan inklusif.

Sekitar 115 ribu awak kapal bersekolah di Sekolah Khusus (SLB), sedangkan awak kapal yang bersekolah di sekolah reguler yang menerapkan sekolah inklusif berjumlah sekitar 299 ribu (MINA, 2017). Rendahnya jumlah ABK yang menerima layanan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya anak-anak yang tidak mau bersekolah, orang tua yang tidak mendukung pendidikan untuk anak-anaknya, akses ke sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal ABK, tidak ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan lain sebagainya.

Kementerian Agama turut serta dalam pengembangan pendidikan inklusif, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa madrasah wajib memberikan akses bagi siswa berkebutuhan khusus, melalui Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama ditentukan untuk mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas) atau dikenal dengan pendidikan inklusif. Pada tahun 2015 madrasah mulai mencoba menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID), sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat terbuka, membangun masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Selain itu, sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dalam meningkatkan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya bagi seluruh sistem pendidikan (Stubbs, 2002) termasuk lembaga pendidikan Islam sebagai penyedia pendidikan inklusif, sekolah yang memberikan pendidikan inklusif harus mengadopsi pendekatan manajemen dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan (Mayasari, 2021)

Secara umum, lembaga pendidikan inklusif adalah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus di kelas yang sama, sekolah yang memberikan pendidikan inklusif merupakan tempat pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk mendapatkan perlakuan yang proporsional dari semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsekuensi dari kondisi sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif menuntut penyesuaian strategi pembelajaran dalam upaya implementasi kurikulum yang telah diratifikasi secara nasional (Budiyanto, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik untuk menggali bagaimana praktik pendidikan inklusi dilaksanakan secara nyata tanpa manipulasi sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap dinamika pendidikan inklusi di sekolah tersebut, serta dukungan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah. Metode penelitian ini adalah penelitian di lapangan, penelitian ini kami lakukan ada 3 Sekolah diantaranya: SD Alam Banyu Belik, SMP Muhammadiyah 3 purwokerto, MI Ma'arif NU 1 Bentul, adapun informasi yang menjadi sumber dari penelitian tersebut yaitu 3 orang yang termasuk di dalamnya yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Data tersebut dikumpulkan Dengan cara mengobservasi sekolah guna untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran dan penangan guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Tujuan kami terjun ke lapangan ini untuk melihat cara guru mengajar di kelas dan metode yang guru tersebut pakai. Lalu untuk memperdalam data di saat observasi kami menggunakan teknik wawancara dengan guru dan pihak kepala sekolah untuk menyempurnakan penelitian kami. Sedangkan Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. **Observasi Partisipatif**
Peneliti secara langsung terlibat dalam lingkungan yang diteliti untuk mengamati fenomena yang terjadi. Observasi ini tidak hanya bersifat pasif, tetapi peneliti ikut merasakan dan mengalami situasi sosial yang sedang dikaji. Teknik ini efektif untuk memahami konteks sosial, budaya, serta interaksi antar individu dalam lingkungan penelitian.
- b. **Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)**
Digunakan untuk menggali data secara lebih rinci dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap fleksibel mengikuti arah percakapan. Dengan teknik ini, informasi yang diperoleh lebih kaya, mendalam, dan bersifat personal.
- c. **Studi Dokumentasi**
Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumen bisa berupa arsip sekolah, laporan kegiatan, foto, catatan harian, jadwal, dan lain sebagainya. Studi dokumentasi berfungsi sebagai bukti fisik dan penguat dari temuan lapangan.
- d. **Catatan Lapangan (Field Notes)**
Peneliti mencatat setiap hal penting yang diamati selama berada di lapangan, termasuk ekspresi non-verbal, situasi sosial, dan peristiwa yang tidak terekam dalam alat dokumentasi. Catatan ini sering menjadi data pendukung dalam menafsirkan makna dari perilaku atau peristiwa.
- e. **Foto dan Video Dokumentasi**
Teknik visual digunakan sebagai data tambahan yang memperkaya deskripsi hasil penelitian. Misalnya, dokumentasi kegiatan belajar mengajar, interaksi siswa, atau kondisi lingkungan sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 MI Maarif NU 1 Bentul-Kebasen

Profil Sekolah

Nama Sekolah : MI Maarif NU1 Bentul
NPSN : 60710387
Alamat : Jl. Bentul – Kebasen RT 009 RW 003
Desa : Kebasen
Kabupaten/Kota : Kecamatan Kebasen
Kabupaten : Banyumas
Propinsi : Jawa Tengah
Status Sekolah : Swasta
Bentuk Pendidikan : MI
Tingkat Pendidikan : DIKDAS

Implementasi Pendidikan Inklusif

Kebijakan Sekolah

MI Ma'arif NU 1 Bentul bersedia menjadi lembaga pendidikan yang inklusif karena seruan jiwa yang mendalam untuk menumbuhkan semangat toleransi dan kepedulian di masyarakat. Ada kepedulian yang tulus terhadap realitas anak-anak berkebutuhan khusus yang sering menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. MI Ma'arif NU 1 Bentul meyakini bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisiknya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bahwa alasan MI Ma'arif NU 1 Bentul bersedia menjadi lembaga pendidikan inklusif adalah karena panggilan jiwa atau dari satuan pendidikan tidak menerimanya, selain itu karena semua siswa berhak atas pendidikan. Keyakinan inilah yang mendorong semua jajaran sekolah untuk membuka pintu lebar-lebar. MI Ma'arif NU 1 Bentul menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan inklusif melalui kehadiran 8 siswa penyandang disabilitas di

lingkungan sekolah. Keberagaman ini merupakan cerminan dari dedikasi sekolah dalam memberikan pendidikan yang relevan dengan berbagai kebutuhan, mengingat delapan siswa tersebut memiliki kategori kebutuhan khusus yang berbeda. Dari delapan siswa tersebut, tiga diantaranya mengalami penanganan yang serius yaitu siswa kelas 4 yang menyandang tuna daksa Dimana ia mengalami kesulitan berjalan (kram tulang) serta dua diantaranya yaitu kelas 5 dan kelas 1 yang mengidap autism, Dimana dalam penanganannya perlu dibantu tim medis.

MI Ma'arif NU 1 Bentul memiliki visi, misi, dan tujuan di lembaganya. MI Ma'arif NU Bentul sebagai lembaga pendidikan dasar yang berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan siswa, orang tua siswa, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan visinya. MI Ma'arif NU Bentul juga diharapkan dapat merespon perkembangan dan tantangan di masa depan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. MI Ma'arif NU Bentul ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi berikut: "Terwujudnya Generasi Islami, Inovatif dan Inklusif sesuai dengan Pemahaman Ahlulsunah Waljamaah" Sementara itu, misi MI Ma'arif NU Bentul terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis keyakinan Islam dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menumbuhkan istiqomah dalam menjunjung tinggi akidah 'ala ahlulsunah
2. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa dengan kecerdasan majemuk dasar
3. Pelaksanaan pendidikan berbasis lingkungan sosial dengan mengedepankan budaya kearifan lokal untuk menumbuhkan kepekaan sosial di lingkungan madrasah.
4. Menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan proses untuk menanamkan nilai pengalaman sebagai media pembelajaran yang langsung dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan pendidikan di MI Ma'arif NU Bentul adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjutan. Berangkat dari tujuan umum pendidikan dasar, MI Ma'arif NU Bentul memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Lulusan memiliki iman yang kuat dan rajin beribadah dengan benar.
2. Lulusan memiliki karakter yang jujur, sopan, disiplin, dan bertanggung jawab.
3. Wisudawan memiliki karakter toleran, menghormati perbedaan, memiliki semangat persatuan, kepedulian dan bermanfaat bagi sesama.
4. Lulusan memiliki budaya hidup yang bersih, sehat dan bugar.
5. Lulusan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Rata-rata Penilaian Madrasah (AM) mencapai skor 85.
7. Proporsi lulusan yang melanjutkan ke sekolah unggulan setidaknya 30%.
8. Memiliki tim tingkat Kabupaten.
9. Memiliki tim olahraga minimal 3 cabang dan mampu menjadi finalis di tingkat kabupaten.
10. Memiliki tim seni yang mampu tampil di acara tingkat kabupaten.
11. Kualifikasi akademik 100% pendidik adalah Strata 1 (S1).

Kurikulum dan Pembelajaran

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan kepala sekolah, Bapak Amir, mengenai pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif di MI Ma'arif NU 1 Bentul, yaitu adanya KTSP inklusi dan kurikulum merdeka KTSP, keduanya disisipkan apa hubungannya dengan ABK. Keduanya diselaraskan untuk mengakomodasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Keterkaitan kurikulum dirancang khusus untuk menyediakan kerangka kerja adaptasi kurikulum bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan dan partisipatif, salah satunya melalui permainan yang melibatkan seluruh siswa secara bersama-sama tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisik dan mentalnya. Dengan cara ini, sikap inklusi ditanamkan sejak dini sehingga tumbuh menjadi kebiasaan positif dalam interaksi sosial siswa.

Peran Guru

Pendidikan inklusi di sekolah ini dilaksanakan dengan sistem pembagian tugas diantara para tenaga pendidik. Kepala sekolah berperan sebagai pembina utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, sedangkan guru pembimbing khusus (GPK) berjumlah empat orang yang bertugas membimbing siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan kepala sekolah yaitu Bapak Amir, bahwasanya dari total 20 guru yang ada di sekolah ini, hanya empat orang yang bersedia dan memiliki komitmen untuk menjalankan peran sebagai GPK. Hal itu dikarenakan perlunya kesabaran yang luas dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Setiap kelas inklusi biasanya didampingi oleh dua guru yaitu guru umum dan guru pembimbing khusus yang bertugas memberikan bimbingan, pendampingan, serta memastikan anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.

Guru tersebut telah beberapa kali diikutsertakan dalam pelatihan pendidikan inklusi di Purwokerto, Sokaraja, Semarang, dan juga SLB Ma'arif selama 5 hari, serta rutin mengikuti pelatihan via online di forum guru

sekolah inklusi dan pendidikan khusus se-Indonesia. Selain itu, juga diadakannya kerjasama antara pihak madrasah dengan Puskesmas Kebasen. Dilihat dari proses pembelajaran dikelas inklusi ini berjalan secara umum seperti kelas reguler. Guru tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan yang sama, namun fleksibel terhadap kebutuhan setiap siswa difabel. Dari 8 siswa difabel ada 3 siswa yang membutuhkan pendampingan khusus dalam proses belajar. Dua siswa diantaranya yang membutuhkan pendampingan khusus adalah siswa kelas 1 dan 5 yang mengidap autisme tipe regresif/epileptic, yaitu tipe autisme yang dapat ditandai dengan ketidakmampuan memahami orang lain, input sensori yang tidak menentu, bacaan EEG yang tidak normal, retardasi mental dan tingkat kecerdasan tinggi. (Naili et al., n.d.) Siswa kelas 5 tersebut menurut pengakuan dari guru pembimbing khususnya sering sekali mengalami kejang-kejang secara mendadak. Selain itu ada, terdapat siswa kelas 2 yang mengalami kesulitan atau keterlambatan belajar. Untuk para siswa difabel lainnya yang masih dapat diatasi akan diawasi dan dibimbing oleh wali kelasnya yang juga merangkap sebagai guru pembimbing khusus.

Sikap para guru dan siswa non difabel terlihat cukup ramah kepada siswa difabel. Mereka tidak membeda-bedakan dan terlihat cukup bersahabat dengan siswa difabel. Apabila terdapat siswa difabel dengan kondisi hiperaktif atau yang membutuhkan perhatian khusus, siswa tersebut akan diarahkan ke ruang TU atau ruang kepala sekolah untuk ditenangkan atau dibimbing secara individual karena belum tersedianya ruang sumber atau ruang khusus bagi siswa difabel. Kepala sekolah juga senantiasa ikut turun tangan untuk menangani siswa difabel tersebut.

Sarana dan Prasarana

Ketidakterselesaiannya ruangan ini menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi karena terbatasnya ruang untuk penanganan dan pembelajaran yang lebih intensif. Walaupun demikian sekolah tetap berkomitmen dan berusaha memenuhi fasilitas dan media belajar sekolah guna mendukung kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran. Fasilitas dan media yang ada berupa toilet khusus difabel yang masih dalam proses pembangunan, tersedianya kursi roda, dan alat pegangan di tangga madrasah.



Gambar 1. Toilet khusus ABK



Gambar 2. Kursi Roda



Gambar 3. Pegangan di tangga

Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi pembelajaran di kelas inklusi di MI Ma'arif NU Bentul dilaksanakan dengan pendekatan yang fleksibel dan menyesuaikan kondisi peserta didik. Untuk siswa difabel, evaluasi dilakukan secara individual dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Guru tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga mempertimbangkan proses dan perkembangan yang dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajar. Penilaian ini bersifat lebih personal dan adaptif agar siswa difabel tetap merasa dihargai dan termotivasi. Sementara itu, untuk siswa non-difabel, evaluasi tetap mengacu pada standar kurikulum nasional yang berlaku. Dengan pendekatan ini, madrasah berusaha menjaga keseimbangan antara pencapaian kurikulum dan kebutuhan khusus peserta didik di lingkungan pembelajaran yang inklusif

Dukungan Orang Tua dan Lingkungan serta tantangannya

Dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi, sekolah juga menjalin kerja sama dengan puskesmas terdekat yaitu di puskesmas Kebasen. Biasanya, pada saat awal masuk sekolah, orang tua siswa membawa surat keterangan dari dokter sebagai bagian dari proses identifikasi kebutuhan khusus anak. Meskipun kerja sama ini masih terbatas, namun kehadiran pihak medis sangat membantu dalam memberikan informasi awal mengenai kondisi anak serta rujukan yang diperlukan untuk penanganan lebih lanjut. Keterlibatan keluarga menjadi aspek penting dalam keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah ini. Guru dan orang tua menjalin komunikasi secara rutin untuk membahas perkembangan anak dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekolah sangat terbuka dalam menerima masukan dari orang tua dan menjadikannya bagian dari proses evaluasi

pembelajaran. Selain itu, masyarakat sekitar juga dilibatkan melalui kegiatan tahunan seperti Gebyar Inklusi dan sosialisasi pendidikan inklusi yang biasanya diadakan di masjid masjid.

Gebyar inklusi diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam merayakan Hari Pendidikan Nasional/Hardiknas. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk membangun keterampilan dan kreativitas anak berkebutuhan khusus dengan kegiatan pembuatan karya dan latihan tari untuk tampil dalam pentas acara Gebyar Inklusi. Event ini sangat memberi ruang kreatifitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena Gebyar Inklusi menyediakan acara pameran hasil karya anak berkebutuhan khusus, pentas seni anak berkebutuhan khusus, serta konsultasi penanganan anak berkebutuhan khusus (Pascarina, 2024)

Meskipun telah menerapkan berbagai pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, MI Ma'arif NU 1 Bentul masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang setara dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kondisi individual mereka.

4.2 SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto

Profil Sekolah

SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto adalah sekolah swasta yang berlokasi di Jl. Dr. Angka No. 79, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekolah ini berada di lingkungan perkotaan yang cukup strategis, memudahkan akses bagi siswa dan tenaga pendidik. Didirikan pada 23 Mei 1989, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto beroperasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan akreditasi A, sekolah ini telah mendapatkan Nomor SK Akreditasi 1347/BAN-SM/SK/2021 yang diterbitkan pada 8 Desember 2021.

Saat ini, sekolah memiliki 249 siswa, terdiri dari 144 siswa laki-laki dan 105 siswa perempuan. Mereka dibimbing oleh 15 guru profesional yang berpengalaman dalam bidangnya. Fasilitas yang tersedia di sekolah ini cukup lengkap, meliputi ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains, perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam, lapangan olahraga untuk kegiatan ekstrakurikuler, serta masjid untuk kegiatan keagamaan. Semua fasilitas ini dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal bagi siswa.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pendidikan inklusif, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto berupaya menyediakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Program inklusi di sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa dalam mengakses pendidikan berkualitas. Program ini mencakup pendampingan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, pelatihan bagi guru dalam metode pembelajaran inklusif, serta penyediaan fasilitas yang mendukung keberagaman kebutuhan siswa. Dengan adanya program ini, sekolah berharap dapat menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan setiap siswa sesuai dengan potensinya.

Implementasi Pendidikan Inklusif

Kebijakan Sekolah

Pendidikan inklusi merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto bersedia menjadi Lembaga Pendidikan Inklusi karena ingin menyamakan hak semua siswa dalam memperoleh pendidikan. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan akses pembelajaran yang layak dan setara dengan siswa lainnya. Sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Berikut adalah visi, misi, dan tujuan SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto:

Visi : Beriman, Bertaqwa. Unggul Dalam Prestasi, dan Berwawasan Lingkungan

Misi :

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran islam melalui pembelajaran iqro, tadarus Al-Qur'an, tahfidz, sholat dhuha, sholat dhuhur dan jum'at berjamaah.
2. Meningkatkan pembelajaran yang efektif, tuntas, minimal tercapai kelulusan 100%.
3. Menumbuhkan kedisiplinan dalam segala aspek.
4. Mendorong siswa untuk mengenali potensi diri dan meningkatkan kreatifitas dalam seni dan olahraga.
5. Membangun karakter siswa peduli lingkungan dengan gerakan penghijauan dan berbudaya bersih

Tujuan :

1. Terwujudnya manusia muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia percaya diri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat dan negara, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan untuk mewujudkan dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara

3. Bersama pemerintah memajukan, meyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan UUD Pasal 31

Dalam perencanaan SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto merancang program dalam penerimaan siswa baru, kurikulum, merancang Sarana dan Prasarana.

Identifikasi dan Penerimaan Siswa Difabel

Sekolah berkomitmen untuk menerima siswa dengan kebutuhan khusus (ABK) dalam sistem pendidikan yang setara. Penerimaan ini dilaksanakan melalui penilaian awal untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan setiap siswa. Saat ini, ada 8 siswa difabel, dimana 2 siswa memerlukan dukungan khusus, yaitu seorang siswa kelas 7 yang mengalami keterlambatan belajar, sehingga masih menghadapi kesulitan dalam membaca dan menulis, serta seorang siswa kelas 9 yang menderita *cerebral palsy* dan menggunakan kursi roda, yang dimana *cerebral palsy* merupakan bentuk kelainan yang terjadi pada aspek motorik yang disebabkan oleh disfunksinya sistem persarafan di otak dengan gambaran klinis yang diakibatkan oleh luka pada otak, di mana salah satu komponennya menjadi penghalang dalam gerak sehingga timbul kondisi yang tampak semenjak kanak-kanak dengan sifat-sifat seperti lumpuh, lemah, tidak adanya koordinasi atau penyimpangan fungsi gerak disebabkan oleh patologi pusat kontrol gerak di otak

Kurikulum dan Pembelajaran

Materi dan metode pembelajaran dirancang agar inklusif, dengan penyesuaian bagi siswa difabel. “Di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto, Guru akan mendiskusikan soal ujian dalam rapat sebelum pelaksanaan ulangan guna memastikan bahwa pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Siswa difabel yang mengalami kesulitan memahami materi mendapatkan penyesuaian soal ujian dalam bentuk gambar dan logo sebagai bagian dari alat bantu belajar” tambah Bu Mia selaku guru BK SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto.

Peran Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru BK serta tenaga pendidik mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) sebagai bentuk pelatihan dalam menangani siswa ABK. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mendukung pembelajaran inklusif. “Majelis Muhammadiyah juga menyediakan layanan dokter, seperti Dr. Tri dari Margono, untuk memberikan pemahaman kepada seluruh guru mengenai pendekatan yang tepat dalam pendidikan bagi siswa difabel” jelas Bu Mia selaku guru BK SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto.

Sarana dan Prasarana

Sekolah telah berusaha menyediakan fasilitas seperti jalur khusus bagi siswa yang menggunakan kursi roda, guna memastikan kemudahan akses. Selain itu, dalam pengelolaan kelas, siswa difabel ditempatkan dalam sistem yang merata tanpa adanya pemisahan khusus, sehingga dapat berbaaur dan berinteraksi dengan teman sebaya.



Gambar 4. Jalur Khusus Kursi Roda

Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi program pendidikan inklusi di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun sekolah telah menunjukkan komitmen dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama

adalah keterbatasan fasilitas serta kurangnya tenaga pendidik yang memiliki spesialisasi dalam pendidikan inklusi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam meningkatkan kualitas program ini.

Dari segi sumber daya, sekolah telah menyediakan beberapa fasilitas yang mendukung pendidikan inklusi, seperti jalur khusus bagi siswa yang menggunakan kursi roda dan alat bantu belajar. Selain itu, Majelis Muhammadiyah telah menyediakan layanan dokter, seperti Dr. Tri dari Margono, untuk memberikan pemahaman kepada guru mengenai pendekatan yang tepat dalam pendidikan inklusi. Meskipun demikian, sekolah masih belum memiliki kerja sama dengan lembaga eksternal yang dapat membantu meningkatkan efektivitas program ini. Kerja sama dengan institusi terkait dapat memberikan dukungan tambahan, seperti pelatihan guru yang lebih intensif dan pengadaan sumber daya yang lebih memadai.

Pelaksanaan program pendidikan inklusi di sekolah ini telah mencakup beberapa aspek penting, seperti pelatihan guru melalui bimbingan teknis (bimtek) dan penyesuaian metode pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk adaptasi yang diterapkan adalah dalam pelaksanaan ulangan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di mana siswa difabel diberikan soal berbasis visual, seperti gambar dan logo, sementara siswa lainnya mendapatkan soal dalam format biasa. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengorganisasian tugas dan tanggung jawab, terutama dalam pendampingan siswa berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih intensif.

Dukungan dan Tantangan

Orang tua siswa difabel dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan anak mereka, termasuk dalam proses asesmen dan perencanaan pembelajaran. Meskipun keterlibatan masyarakat masih terbatas, pihak sekolah berupaya meningkatkan sosialisasi melalui pertemuan wali murid pada awal tahun ajaran baru.

4.3 SD Alam Banyu Belik

Profil Sekolah

Nama	: SD Alam Banyu Belik
NPSN	: 20362753
Alamat	: Jl. Karangangka- Kedungbanteng RT 01 RW 02
Desa/Kelurahan	: Karangangka
Kecamatan/Kota	: Kedungbanteng
Kabupaten	: Banyumas
Provinsi	: Jawa Tengah
Status sekolah	: Swasta
Bentuk Pendidikan	: SD
Jenjang Pendidikan	: DIKDAS

Implementasi pendidikan inklusif

Implementasi Pendidikan Inklusi di SD Alam Banyu Belik mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dengan menekankan pada poin-poin manajemen (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling).

1. Planning (Perencanaan)

Sekolah ini sejak awal pendiriannya sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusif, dengan program-program pembelajaran yang menyatu antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus (ABK). Dalam perencanaan tersebut, disusun kurikulum berbasis TASNIM (Terapan, Sunnah, Bernalar, Insting, dan Mandiri) yang menggabungkan kurikulum Merdeka, kurikulum Islam terpadu, serta kurikulum alam untuk mendukung gaya belajar yang beragam, sesuai kebutuhan siswa.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pada tahap pengorganisasian (organizing), SD Alam Banyu Belik menata struktur dan peran secara sistematis. Sekolah berada di bawah naungan yayasan, dengan kepala sekolah dan guru yang berkolaborasi dengan fungsional seperti Guru Pendamping Khusus (GPK). Jumlah GPK ditentukan berdasarkan karakteristik ABK yang terdaftar, dengan pendekatan yang fleksibel: jika seorang ABK mampu mengikuti pembelajaran reguler secara mandiri, maka tidak perlu didampingi GPK. Selain itu, orang tua juga dilibatkan sebagai mitra pengelolaan pendidikan anak, khususnya dalam proses adaptasi anak di rumah dan sekolah.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pada aspek pelaksanaan (actuating), pembelajaran dilakukan secara kontekstual dan aplikatif, menggabungkan teori dan praktik langsung di alam. Seluruh siswa termasuk ABK mengikuti kegiatan yang sama, seperti cooking class, outbond, renang, hingga kegiatan pertanian dalam program Traditional Living. Pelibatan semua siswa secara inklusif tanpa diskriminasi memperlihatkan upaya penggerakan sumber daya manusia secara aktif, dengan guru memfasilitasi pembelajaran yang adaptif sesuai karakter masing-masing siswa. Bahkan, pembelajaran untuk siswa hiperaktif disesuaikan dengan memberi ruang aktivitas fisik yang positif.



Gambar 5. Siswa-siswi ABK dan reguler melakukan outbound

4. Pengawasan (Controlling)

Sementara itu, pengawasan (controlling) dilakukan secara intensif dan berlapis. Guru menggunakan metode “dubbing” (observasi harian langsung) untuk memantau perkembangan siswa, terutama ABK yang hiperaktif. Selain itu, ada monitoring empat mingguan dan evaluasi harian melalui catatan guru dan laporan perkembangan anak dari orang tua. Sekolah juga menjaga pola makan sehat sebagai bagian dari pengawasan holistik terhadap gizi dan kesehatan anak, khususnya yang membutuhkan khusus. Evaluasi ini melibatkan rapat mingguan guru dan evaluasi besar bersama yayasan dan orang tua secara berkala.

Dukungan dan Tantangan

Pendidikan inklusi di SD Alam Banyu Belik mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari berbagai aspek, baik secara struktural maupun kultural. Dukungan utama datang dari yayasan yang menaungi sekolah, yang tidak hanya berperan dalam pembiayaan tetapi juga dalam merancang visi, misi, dan arah strategis pendidikan di sekolah ini. Yayasan tersebut memiliki pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pondok pesantren, serta unit usaha, yang semuanya terintegrasi untuk mendukung pembelajaran siswa. Yayasan memberikan ruang yang besar bagi pengembangan program-program inklusi yang adaptif terhadap kebutuhan siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus (ABK). Dukungan ini terlihat nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif.

Dari sisi kurikulum, sekolah mengembangkan perpaduan unik yang terdiri dari kurikulum Merdeka, kurikulum Islam terpadu, serta kurikulum alam, yang disatukan dalam konsep pembelajaran “TASNIM” (Terapan, Adab, Sunnah, Bernalar, Insting, dan Mandiri). Pendekatan kurikulum ini memungkinkan kegiatan belajar mengajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di alam terbuka, seperti sawah, kebun, peternakan, dan sungai. Hal ini sangat mendukung prinsip inklusi, karena menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, menyenangkan, dan kontekstual bagi semua siswa. Kegiatan seperti cooking class, outing class, dan Banyu Belik traditional living dirancang untuk memperkuat empati, kerjasama, mendampingi siswa ABK secara intensif. Guru-guru di sekolah ini dilatih untuk memahami pendekatan kontekstual dan diferensiasi pembelajaran. Dukungan lingkungan belajar yang dinamis dan kemandirian, yang sangat penting dalam pembelajaran inklusif.

Selain itu, peran guru dan pendamping juga menjadi kekuatan utama. Meskipun jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) masih terbatas, keberadaan mereka sangat signifikan dalam, yang menggabungkan aktivitas di dalam dan luar ruangan, membuat siswa ABK merasa lebih nyaman dan terlibat aktif dalam proses belajar.

Dukungan tidak hanya datang dari internal sekolah, tetapi juga dari orang tua dan komunitas sekitar. Orang tua dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran dan pemantauan perkembangan anak. Mereka memberikan feedback melalui laporan perkembangan anak di rumah, bahkan merekam video kegiatan sebagai bentuk kolaborasi antara rumah dan sekolah. Sinergi ini sangat mendukung kesinambungan proses belajar anak. Selain itu, sekolah menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan, pondok pesantren, dan sekolah alam lainnya untuk saling berbagi praktik baik serta memperkaya wawasan dan strategi pembelajaran inklusif. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat mingguan guru, rapat bulanan yayasan, dan evaluasi semester, yang memastikan program berjalan sesuai target dan dapat ditingkatkan jika diperlukan.

Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK). Dalam satu tahun ajaran hanya tersedia dua orang GPK untuk mendampingi sembilan anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti hiperaktif, kesulitan belajar, autisme, dan down syndrome. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi guru karena perlu pendekatan personal yang intens dan tepat sasaran agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya.

Selanjutnya adalah penggunaan teknologi yang masih terbatas. Meskipun pembelajaran lebih difokuskan pada pendekatan alam, namun penggunaan teknologi seharusnya bisa menjadi pelengkap untuk mengakses informasi yang lebih luas dan mendukung media pembelajaran yang inovatif. Guru dan siswa belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, dan hal ini dapat menghambat perkembangan pendidikan di era modern. Dalam konteks pendidikan inklusi, teknologi seperti media visual, aplikasi interaktif, atau platform pembelajaran daring bisa sangat membantu anak-anak ABK dalam memahami materi secara lebih efektif.

Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum. Sekolah memang telah mengadopsi kurikulum berbasis alam dan Islam terpadu, namun belum secara eksplisit mengangkat unsur-unsur budaya lokal seperti bahasa daerah, tradisi, maupun kearifan lokal sebagai bagian dari proses belajar yang lebih kontekstual. Padahal, integrasi ini bisa menjadi strategi pembelajaran yang sangat bermakna dan mendalam, khususnya bagi siswa yang tinggal di lingkungan tersebut.

Dari sisi sumber daya manusia, tidak semua guru memiliki kesiapan mental dan strategi untuk pembelajaran di luar kelas, yang mana menjadi ciri khas sekolah alam. Tantangan belajar di alam menuntut guru memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan mengelola situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, guru perlu pelatihan lebih lanjut agar bisa mendampingi siswa, khususnya ABK, dalam proses pembelajaran yang efektif dan aman di lingkungan terbuka.

Dalam aspek pengawasan dan evaluasi, meskipun telah dilakukan secara rutin, namun masih dibutuhkan sistem dokumentasi dan tindak lanjut yang lebih sistematis. Monitoring melalui "dubbing" (observasi langsung), laporan orang tua, dan pemantauan empat mingguan perlu dilengkapi dengan data yang bisa dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memetakan perkembangan siswa dengan lebih akurat. Hal ini penting agar program intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan individual siswa.

Perbandingan dan Analisis Umum

Ketiga sekolah reguler yang diteliti memiliki persamaan utama, yaitu sama-sama menghadapi tantangan serius berupa minimnya fasilitas pendukung serta keterbatasan jumlah serta kompetensi guru pendamping khusus yang masih jauh dari kata ideal. Adapun perbedaan di antara ketiganya terletak pada bentuk kerja sama dengan pihak eksternal. MI Ma'arif NU 1 Bantul, misalnya, hanya menjalin kerja sama dengan puskesmas terdekat, terbatas pada proses rujukan saat PPDB maupun ketika sekolah mengalami kesulitan dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus karena kurangnya pemahaman tenaga pendidik. Sementara itu, SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto menjalin kolaborasi dengan RS Margono untuk mendukung layanan pendidikan inklusif yang lebih terstruktur. Berbeda dengan keduanya, SD Alam Banyu Belik memiliki jejaring kerja sama yang lebih luas, meliputi Dinas Pendidikan, pondok pesantren, dan sekolah alam lainnya, guna berbagi praktik baik serta memperkaya pendekatan dan strategi dalam pembelajaran inklusif.

Selain itu, ketiga sekolah juga menunjukkan perbedaan dalam penggunaan kurikulum. SD Alam Banyu Belik menerapkan kurikulum berbasis alam yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, menciptakan suasana pembelajaran yang kontekstual dan spiritual. Sementara itu, MI Ma'arif NU 1 Bantul telah mengadopsi kurikulum KTSP inklusi yang kemudian dipadukan dengan Kurikulum Merdeka, sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Adapun SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto telah menerapkan kurikulum yang menyesuaikan kemampuan ABK baik dalam pembelajaran maupun di dalam ujian sekolah. Perbedaan pendekatan kurikulum ini mencerminkan upaya masing-masing sekolah dalam mengembangkan model pendidikan inklusif yang sesuai dengan konteks dan karakteristik lembaganya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan di tiga sekolah reguler, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya jumlah serta kompetensi guru pendamping khusus. Ketiga sekolah memiliki semangat untuk menyelenggarakan pendidikan yang ramah bagi semua anak, namun dukungan yang tersedia belum sepenuhnya memadai. Meskipun demikian, masing-masing sekolah menunjukkan inisiatif dan strategi yang berbeda dalam menjalin kerja sama eksternal untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. SD Alam Banyu Belik tampil lebih progresif dengan menjalin kemitraan luas bersama Dinas Pendidikan dan lembaga lainnya, sementara SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto mengarah pada kolaborasi layanan medis, dan MI Ma'arif NU 1 Bantul masih terbatas pada kerja sama dasar dengan puskesmas. Oleh karena itu, pendidikan inklusif di sekolah reguler perlu terus diperkuat melalui peningkatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar hak anak berkebutuhan khusus benar-benar dapat terpenuhi secara adil dan setara.

REFERENSI

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Dea Mustika, Irsanti, A. Y., Evi Setiyawati, Fretika Yunita, Nurhafizdah Fitri, & Putri Zulkarnaini. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41–50. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575>
- Direktorat PSLB. 2004. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Khusus. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Dini Prima Putri, Agus Pahrudin, O. D. (2016). MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSI PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. 5(1), 1–23.
- Fionita, W., & Nurjannah, E. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif Sebagai Perubahan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.36456/bp.vol15.no27.a1790>
- Fernandes, R. (2017). ADAPTASI SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF Reno. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2).
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. (2023). JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti PERMASALAHAN SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KUSUS. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1(1), 20–30. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/article/download/2109/604/>
- Naili, M., Setiawan, R., & Khoirunnisaa', F. (n.d.). Strategi Konselor dalam Membantu Penyesuaian Diri Anak Berkebutuhan Khusus di Era Milenial. In *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*.
- Sari, F., & Salistina, D. (2025). Menggagas Pendidikan Inklusi di PAUD melalui Pemahaman dan Kesiapan Mahasiswa. 13(1), 30–40.
- Tea, Y. V., Pio, M. O., Tini, F. A., & Tia, E. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 75–87. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2121>